



▶ TANAH KAS DESA

Bupati Keluarkan 90 Rekomendasi Penggunaan TKD

SLEMAN—Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman menyampaikan ada 90 rekomendasi Bupati Sleman untuk permohonan penggunaan tanah kas desa (TKD) yang tercatat akhir 2024 hingga Juni 2025.

Andreas Yuda Pramono
andreas.yuda@harianjogja.com

Kepala Dispertaru Sleman, Agung Armawanta, mengatakan rekomendasi tersebut hanya menjadi pengantar untuk pengurusan izin penggunaan TKD ke Pemda DIY. Kalurahan tidak bisa hanya memanfaatkan surat rekomendasi tersebut untuk menggunakan TKD. "Kalurahan istilahnya punya dua pekerjaan. *Pertama*, perlu mengajukan rencana penggunaan TKD ke Forum Penataan Ruang [FPR]. *Kedua*, setelah FPR turun, ada tahap lanjutan perizinan di tingkat provinsi," kata Agung dihubungi, Sabtu (5/7).

▶ Kalurahan tidak bisa hanya memanfaatkan surat rekomendasi tersebut untuk menggunakan TKD.

▶ Kendala dalam pengurusan perizinan TKD, di antaranya tidak semua syarat lengkap dan belum tentu benar.

Adapun permohonan penggunaan TKD yang masuk ke FPR pada akhir 2024 hingga 19 Juni 2025 ada 1.093 permohonan. Sebanyak 499 rencana penggunaan dari keseluruhan permohonan tersebut masuk ke tahap *plotting* dan verifikasi peta per 18 Juni 2025.

Agung menerangkan ada banyak permohonan penggunaan TKD pasca terbitnya Peraturan Gubernur DIY No. 24/2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. "Karena kami memiliki keterbatasan sumber daya manusia, kami lakukan kosinyering percepatan yang melibatkan lintas bidang sejak April 2025," katanya.

Kendala dalam pengurusan perizinan TKD, kata Agung tidak semua syarat lengkap. Apabila syarat lengkap pun belum tentu benar. Ada juga luas TKD yang diajukan

masih menyertakan lahan sertifikat hak milik (SHM). Proses tukar guling TKD dengan SHM juga masih berjalan.

Lurah Gayamharjo, Prambanan, Parwoko, mengatakan jajarannya masih mendata TKD. Pengajuan izin penggunaan untuk pengembangan program kalurahan telah dilakukan ke FPR. Rencana penggunaannya ada yang untuk pengembangan sekolah dasar, puskesmas pembantu, balai kalurahan, hingga pasar desa.

"Pemanfaatan TKD di Gayamharjo masih belum maksimal. Gayamharjo juga terletak di wilayah pinggiran," kata Parwoko, Minggu.

Parwoko juga mengaku tidak akan menggunakan TKD untuk mendirikan gedung Koperasi Desa Merah Putih. Dia memilih memanfaatkan ruang kalurahan yang masih kosong. Apalagi anggaran pembangunan gedung juga belum ada.

Dia berencana mengembangkan Embung Lemahbang yang berada di TKD. Embung ini akan dikembangkan untuk memanfaatkan potensi bangkitan ekonomi di sekitar ruas Gayamharjo- Prambanan. Ruas jalan tersebut merupakan bagian dari jalan alternatif Sleman-Gunungkidul.